

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 3 Bulan Maret 2021 (tanggal 14 s.d 18 Maret)



PERSIAPAN PEMILU SERENTAK 2024

Juniar Laraswanda Umagapi
Peneliti Pertama Bidang Politik Dalam Negeri
juniarumagapi@dpr.go.id

**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat mengeluarkan revisi UU atau RUU Pemilu dari daftar Prolegnas 2021. RUU Pemilu rencananya akan digantikan dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pengambilan keputusan tersebut dilakukan saat rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Menkum HAM Yasonna Laoly di gedung DPR/MPR pada tanggal 9 Maret 2021. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh Yasonna Laoly ini memutuskan RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2021.

Berdasarkan pandangan fraksi, Supratman mengatakan hanya PKS yang menolak RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2021. Sementara fraksi lainnya sepakat agar RUU Pemilu dikeluarkan. Dengan demikian tentu pemerintah akan tetap melaksanakan pemilu seperti jadwal sebelumnya. Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU memaparkan simulasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. KPU memiliki dua alternatif hari pemungutan suara Pemilu serentak 2024 yakni 14 Februari atau 6 Maret. Adapun untuk pemungutan suara Pilkada 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yakni pada 13 November 2024.

SUMBER

Kompas Selasa 16 Maret 2021, CNN Indonesia Selasa 16 Maret 2021, dpr.go.id Senin 15 Maret 2021, detiknews Selasa 9 Maret 2021